

kerawanan pangan. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari dengan nilai Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.000 KKal/Kapita/Hari. Jika konsumsi energi per kapita per hari kurang atau lebih kecil dari 70 % dari AKE dikategorikan sangat rawan pangan, dan jika konsumsi energi 70 - 80 % AKE disebut rawan pangan ringan; jika konsumsi 81 - 90 % AKE dinyatakan rawan pangan sedang. Selanjutnya konsumsi energi 91 - 110 % AKE wilayah tersebut dinyatakan tahan pangan, sedangkan lebih besar dari 110 % AKE maka wilayah tersebut dinyatakan kelebihan konsumsi pangan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang ada pada pengembangan pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Kurangnya pelatihan terhadap pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
- b. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
- c. Terbatasnya tenaga/sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas khususnya PNS (jumlah PNS hanya 17 orang)
- d. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
- e. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
- f. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi.
- g. Masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha.
- h. Fluktuasi harga pangan.
- i. Masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, bergizi, seimbang dan aman.

2.4.2 Peluang

Peluang yang ada pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

- a. Adanya teknologi yang selalu berkembang
- b. Trend perubahan perilaku masyarakat konsumen terhadap produk olahan pangan
- c. Pangsa pasar yang semakin terbuka, terutama pasar domestik
- d. Makin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beraneka, sehat, bergizi, dan berkualitas.
- e. Potensi diversifikasi bahan pangan.

- f. Tersedianya anggaran yang cukup baik dari APBD maupun APBN untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Ketahanan Pangan.
- g. Adanya koordinasi dengan Badan POM dan Dinas Kesehatan dalam melakukan berbagai upaya agar terdapat standar pangan yang sehat serta bebas bahan pengawet.
- h. Tersedianya pekarangan masyarakat untuk pelaksanaan penanaman pangan lokal yang berkualitas serta dapat meningkatkan pendapatan.
- i. Adanya harga pembelian pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog, LDPM dan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat.
- j. Terbentuknya Kelompok pada daerah rawan pangan yang dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat miskin.
- k. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam upaya pengentasan kemiskinan
- l. Adanya kebijakan Nasional percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- m. Adanya kebijakan pemerintah bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajib.

Dari uraian Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Republik Indonesia dimana tantangan Nasional dalam pembangunan Ketahanan Pangan terdapat kesamaan dengan kondisi di Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dimana yang menjadi tantangan utama adalah belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan, adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor, perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil, masuknya produk pangan dari luar dan tingginya tingkat persaingan usaha, fluktuasi harga pangan dan masih terbatasnya konsumsi pangan berimbang, beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Walaupun begitu banyak tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan namun terdapat juga peluang-peluang yang terbuka untuk di laksanakan seperti masih banyaknya jenis komoditi pangan yang belum diusahakan secara intensive oleh masyarakat, pangan olahan yang beranekaragaman yang telah diusahakan dan perlu pengembangan/inovasi lebih lanjut untuk menyaingi makanan siap saji dan import serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pembangunan ketahanan pangan ditingkat Kabupaten.

Dari tantangan dan peluang pembangunan ketahanan pangan yang terdapat pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan kabupaten Lima Puluh Kota mengingat karakteristik dan budaya masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya masih terpaku pada konsumsi satu jenis bahan pangan pokok, masih menganggap pangan siap saji lebih baik dari pangan olahan sendiri/lokal. Tingginya fluktuasi harga bahan pangan pokok disebabkan oleh musibah berupa bencana alam, musim kemarau dan serangan hama penyakit serta tingginya permintaan bahan pangan pokok dari Provinsi dan Daerah sekitar.

Rencana Tata Ruang Wilayah juga mempengaruhi lokasi pembangunan lumbung pangan untuk cadangan masyarakat maupun cadangan pangan daerah. Pada umumnya untuk pembangunan lumbung pangan masyarakat lebih ditekankan pada daerah rawan pangan sedangkan secara kajian Tata Ruang Dan Wilayah untuk pembangunan tersebut diarahkan kepada daerah sentra produksi pangan. Hal ini sangat bertolak belakang dengan daerah rawan pangan yang merupakan daerah minus produksi pangan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Isu strategis yang menjadi masalah pokok dalam pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel III.13
Pemetaan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya kualitas sumber daya manusia	1. Belum tercukupinya ketersediaan energi dan protein masyarakat	1. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat 2. Rendahnya tingkat pendapatan keluarga
		2. Belum tersedianya cadangan pangan daerah dalam jumlah yang cukup	1. Kurangnya pagu dana untuk pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah 2. Belum optimalnya koordinasi antara stakeholder pengelola pangan dengan pemerintah daerah 3. Stabilitas harga pangan yang fluktuatif.
		3. Tingginya persentase kecamatan kategori rawan pangan	1. Kurangnya ketersediaan pangan ditingkat masyarakat 2. Sulitnya akses bahan pangan ditingkat masyarakat maupun daerah

			3. Masih rendahnya pemanfaatan pangan yang berkualitas
2	Belum Optimalnya pengelolaan potensi daerah	4. Masih sedikitnya Nagari yang memiliki sarana lumbung pangan	1. Pola konsumsi pangan yang masih bersifat harian 2. Perilaku masyarakat yang tidak membuat/menyediakan cadangan pangan keluarga
		5. Sedikitnya jumlah Nagari mandiri pangan	1. Masih banyak terdapat Nagari kategori rawan pangan 2. Belum optimalnya fungsi lembaga pengelola pangan ditingkat masyarakat.
		6. Belum tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1. Rendahnya tingkat kecukupan gizi masyarakat 2. Perilaku dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang gizi 3. Kurangnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat
		7. Sedikitnya jumlah sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji lapangan dan laboratorium	1. Masih ada pangan yang mengandung bahan kimia dan zat adiktif lainnya yang tidak memenuhi standar kesehatan. 2. Kurangnya anggaran untuk pengujian sampel pangan 3. Rendahnya tingkat keamanan pangan segar dan pangan olahan

Berdasarkan **Isu Strategis** dan **Identifikasi Permasalahan** tersebut di atas

diharapkan ke depan tercipta suatu kondisi yaitu :

1. Kesadaran Masyarakat semakin meningkat akan pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan
2. Kesadaran Masyarakat semakin meningkat untuk berinovasi, berkreasi dan berteknologi dengan sehat
3. Masyarakat semakin pintar memanfaatkan teknologi pangan lokal secara maksimal dan berkesinambungan.
4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses bahan pangan strategis sepanjang waktu.
5. Tertanganinya kerawanan pangan pada kondisi tertentu melalui program tanggap darurat lintas sektoral.
6. Masyarakat semakin menyadari akan pentingnya mengkonsumsi dan membudidayakan sumber pangan alternatif sebagai pengganti beras.
7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
8. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mengkonsumsi pangan olahan yang sesuai standar mutu kesehatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Visi

Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” berlandaskan iman dan taqwa.

3.2.2 Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
5. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.
6. Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan dan daerah berbasis perjuangan.

Dinas Pangan sebagai penyelenggara urusan pangan dalam pelaksanaan pembangunan mengacu kepada misi nomor 2 (dua) yaitu “**Meningkatkan taraf**

hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian dan reformasi kelembagaan berbasis masyarakat dengan pemanfaatan potensi daerah” menterjemahkan dalam bentuk sasaran Dinas Pangan Mewujudkan Nagari Mandiri Pangan dan meningkatkan keamanan pangan daerah. Dinas Pangan menselaraskan dengan program kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat sebagai stakeholder di tingkat tapak dan dalam menjaga stabilitas distribusi serta ketersediaan cadangan pangan melibatkan instansi pemerintah lainnya seperti Bulog dan menginisiasi pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

3.3.1 Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian

Perencanaan pembangunan ketahanan pangan tidak hanya pada peningkatan produktifitas yang tinggi, tetapi juga apakah peningkatan produksi pangan tersebut sudah dapat memperbaiki gizi masyarakatnya. Oleh karena itu perencanaan ketahanan pangan harus bersifat holistik, realistik, kontinyu dan aktual. Konsekuensinya dalam pembuatan perencanaan pangan bukan hanya hasil saja yang harus diperlihatkan, tetapi juga mengenai bagaimana caranya merumuskan pilar ketersediaan dan kerentanan pangan, pilar distribusi pangan dan pilar pola konsumsi dan keamanan pangan dapat berproses dan berjalan secara senergis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan yaitu pengembangan SDM, mengacu pada kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempunyai visi 2015 -2019, yaitu : “Terwujudnya Ketahanan Pangan melalui Penganekaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan”.

Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian mengemban misi dalam tahun 2015 - 2019, yaitu :

- a. Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal.
- b. Memantapkan penanganan kerawanan pangan.
- c. Meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat untuk pangan pokok.
- d. Mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal.
- e. Mewujudkan keamanan pangan segar.

Dari visi dan misi tersebut Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan pangan tahun 2016-2021 meliputi :

- a. Ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 63 gram/hari;
- b. Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;
- c. Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1% per tahun yang diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi umbian dan sumber protein hewani, buah-buahan dan sayuran sehingga terjadi peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;
- d. Terpantainya distribusi pangan lancar sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;
- e. Tersedianya cadangan pangan pemerintah kabupaten, serta berkembangnya 16 lumbung pangan di nagari MANTAP.
- f. Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan partisipasi masyarakat;
- g. Meningkatnya efektivitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan.

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Dalam pembuatan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2021 mengacu kepada Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Adapun Visi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah Terwujudnya Institusi yang handal dalam memantapkan kemandirian pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal. Sedangkan misi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tersebut, yaitu:

- a. Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi dan mutu pangan masyarakat yang aman berbasis sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.
- b. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sumber daya dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta penanganan kerawanan pangan.
- c. Mewujudkan sistem distribusi pangan dan memupuk cadangan pangan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan.

d. Mengembangkan Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan yang Dikelola Secara Profesional Berbasis Agribisnis dan Memiliki Daya Saing Tinggi.

e. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan kemandirian pangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Pembangunan kedaulatan pangan tidak lepas dari ketersediaan lahan. Dalam RTRW telah disebutkan kawasan peruntukan pertanian yaitu wilayah budidaya pertanian pangan dan hortikultura pada kawasan lahan pertanian basah maupun kering. Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan.

Kegiatan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berhubungan dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis adalah pembangunan gudang lumbung pangan. Pembangunan lumbung pangan ini bertujuan untuk menampung gabah pada waktu musim panen raya dan menampung gabah antisipasi pada musim-musim tertentu.

Pembangunan gudang lumbung pangan masyarakat dibangun di wilayah/daerah sentra produksi dan daerah rawan pangan. Oleh karena itu gudang lumbung pangan

dibangun (lokasi) pada daerah pemukiman sesuai dengan tata ruang wilayah kecamatan/nagari.

Penentuan lokasi gudang lumbung pangan dilakukan dengan cara mengkoordinasikan dengan kecamatan sehingga pihak pemerintah kecamatan dapat memberikan gambaran dimana/lokasi lumbung pangan akan dibangun. Melalui hal diatas dapat diketahui dengan tepat dimana gudang lumbung pangan tersebut akan dibangun sehingga tidak bersentuhan dengan kawasan hutan lindung/cagar alam. Dalam hal ini berdirinya bangunan lumbung berdiri di atas lahan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota di masa datang.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penanganan kerawanan pangan

Potensi kerawanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan.

Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai di wilayahnya.

4. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terjadinya berbagai kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

5. Kelembagaan Ketahanan Pangan

Dinas Pangan sebagai lembaga koordinasi, menuntut adanya hubungan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stake holder yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan. Dengan telah terbentuknya Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan peluang besar bagi daerah untuk mewujudkan ketahanan pangan. Selanjutnya dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan dibentuk Dewan Ketahanan Pangan yang diketuai

Bupati. Dalam pelaksanaannya Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan optimal, berbagai permasalahan masih dijumpai mulai dari kelengkapan dan kemampuan dari Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan, sampai dengan tingkat peran aktif dari setiap anggota Dewan Ketahanan Pangan. Permasalahan koordinasi ini perlu mendapat perhatian, karena 70% keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di daerah ditentukan oleh Instansi di Luar Dinas Pangan.

Selain kelembagaan struktural dan fungsional tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan juga ditentukan oleh kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat. Kelembagaan ketahanan pangan yang ada dimasyarakat juga masih belum berjalan optimal, seperti kelembagaan lumbung pangan dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Seluruh kelembagaan tersebut perlu mendapat sentuhan dan perhatian untuk dapat berjalan dengan baik sehingga perwujudan ketahanan pangan dapat tercapai.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan dan sasaran strategis adalah :

4.1.1 Tujuan

Secara umum tujuan pembangunan ketahanan pangan yaitu mewujudkan dan mengembangkan sistem ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.

Adapun tujuan Dinas Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.
- b. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup diseluruh rumah tangga.
- c. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
- d. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.
- e. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
- f. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.
- g. Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- h. Mengembangkan sistem pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- i. Meningkatnya kinerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantapan ketahanan pangan.

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Pangan dalam peningkatan ketahanan pangan adalah :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari.
 - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
 - c. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
 - d. Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan.
 - e. Jumlah nagari mandiri pangan
 - f. Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi dan Jual Beli Gabah/Beras di Kabupaten
 - g. Tersedianya data harga pangan perbulan

2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.
 - b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan
 - c. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat
 - d. Jumlah Kelompok masyarakat Pelaksana Pembangunan Ketahanan Pangan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
 - e. Jumlah Kelompok Pengolahan yang telah dibina

3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja utama yaitu:
 - a. Nilai evaluasi AKIP

Tabel IV.14
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	mewujudkan dan mengembangkan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya	Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan	Jumlah ketersediaan energi dan protein /kapita/hari.	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari	2.400 kkal/kap/hari
				63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari	63 gr/kap/hari
			Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah	12 ton	12 ton	12 ton	45 ton	47 ton	50 ton
			Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)	38 %	38 %	30%	23%	15%	7%
				38 %	38 %	30%	23%	15%	7%
				75%	75%	80%	85%	90%	95%
			Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan	6	6	8	11	14	16

			Jumlah Nagari Mandiri Pangan	n/a	1	2	3	4	5
			Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi dan Jual Beli Gabah/Beras di Kabupaten	4 Gapoktan/LDPM	3 Gapoktan/LDPM				
			Tersedianya data harga pangan perbulan	12 Dokumen					
	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi,seimbang dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.	67,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	
		Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	75%	75%	80%	85%	90%	95%	

			Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat	2.400 kkal/kap/hari					
			Jumlah Kelompok Wanita Tani/Dasawisma yang Memanfaatkan Pekarangan untuk Pemenuhan Pangan dan Gizi Keluarga	10 KWT/Dasawisma	5 KWT/Dasawisma	15 KWT/Dasawisma	5 KWT/Dasawisma	15 KWT/Dasawisma	6 KWT/Dasawisma
			Jumlah Kelompok masyarakat Pelaksana Pembangunan Ketahanan Pangan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	80 Kelompok					
			Jumlah Kelompok Pengolahan yang telah dibina	23 Kelompok					

		Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP	55	55	60	65	70	75
--	--	---	---------------------	----	----	----	----	----	----

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 perlu diidentifikasi beberapa faktor lingkungan strategis, baik lingkungan strategis internal maupun eksternal seperti yang dapat dilihat pada tabel Analisis SWOT di bawah ini :

**Tabel V.15
Analisis SWOT**

<p>Strengths (Kekuatan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan sumber pangan beragam yang cukup. - Dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah. - Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan gizi. - Tersedianya lahan pekarangan masyarakat yang cukup untuk pengembangan pangan. 	<p>Weaknesses (Kelemahan)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM dalam pengelolaan cadangan pangan - Kurangnya kesadaran masyarakat tentang keamanan pangan untuk di konsumsi. - Kurangnya Alokasi Dana untuk Pegisian Lumbung Pangan Daerah dan Masyarakat.
<p>Opportunity (Peluang)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemajuan teknologi di bidang pangan - Pemanfaatan Lumbung Pangan Pemerintah dan Lumbung Pangan Masyarakat - Penumbuh kembangkan bibit buah dan sayur di pekarangan rumah. 	<p>Threats (Ancaman)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fenomena alam yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pangan penyebab terjadinya gejolak harga sehingga mengakibatkan terjadinya rawan pangan dan gizi. - Pola Makanan yang kurang Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) mengakibatkan mudahnya terserang penyakit.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan strategis tersebut, telah ditentukan beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat di Daerah Rawan Pangan melalui Pengembangan Nagari Mandiri Pangan (Nagari MANTAP).
2. Pemantapan dan pengembangan kapasitas kelembagaan Ketahanan Pangan dan sumberdaya aparatur dalam koordinasi program pembangunan ketahanan pangan.
3. Mendorong terlaksananya koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pembangunan ketahanan pangan masyarakat berdasarkan kebijakan daerah
4. Mendorong diversifikasi konsumsi dan keamanan pangan daerah
5. Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi/memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
3. Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
4. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
5. Pengembangan cadangan pangan daerah
6. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
7. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
8. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
9. Penyusunan Database potensi produksi pangan
10. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
11. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan

Tabel V.16
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis “Yang Mantap” berlandaskan iman dan taqwa		
Misi	:	Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemanfaatan potensi daerah		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan dan mengembangkan sistim ketahanan pangan yang kuat, dinamis dan sinergis. Melalui pengembangan sub sistem ketersediaan pangan, sub sistem konsumsi pangan, sub sistem distribusi pangan, mutu dan keamanan pangan dengan memperhatikan potensi, keragaman sumberdaya pangan dan budaya.		Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penanganan Daerah Rawan Pangan
				Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
				Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
				Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
				Pengembangan cadangan pangan daerah
				Pengembangan Desa Mandiri Pangan
				Pengembangan Lumbung Pangan Desa
				Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
				Penyusunan Database potensi produksi pangan
				Meningkatkan Kesejahteraan Petani

	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur pengelola pembangunan ketahanan pangan	Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan balance score card dan sistem AKIP dan penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

6.1 Program dan Kegiatan Utama

- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - k. Penyediaan Alat Kebersihan
- c. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - b. Pengadaan Mebeleur
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas dengan Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu
 - c. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
- e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi Pertauran Perundang-undangan
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
 - a. Penanganan daerah rawan pangan
 - b. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 - c. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
 - d. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 - e. Pengembangan cadangan pangan daerah
 - f. Pengembangan desa mandiri pangan
 - g. Pengembangan lumbung pangan desa
 - h. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 - i. Penyusunan Database potensi produksi pangan
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
 - a. Peningkatan kemampuan lembaga petani

6.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja sasaran Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan yang selaras dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan indikator utama yaitu:
 - a. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari.
 - b. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah
 - c. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)
 - d. Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan.
 - e. Jumlah Nagari Mandiri Pangan.
 - f. Jumlah Lembaga/Kelompok masyarakat yang Melaksanakan Kegiatan Distribusi dan Jual Beli Gabah/Beras di Kabupaten

- g. Tersedianya data harga pangan perbulan.
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi,seimbang dan aman, dengan indikator utama yaitu:
- a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.
 - b. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan.
 - c. Rata-Rata Konsumsi Energi dan Protein Masyarakat.
 - d. Jumlah Kelompok Wanita Tani/Dasawisma yang Memanfaatkan Pekarangan untuk Pemenuhan Pangan dan Gizi Keluarga
 - e. Jumlah Kelompok masyarakat Pelaksana Pembangunan Ketahanan Pangan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis
 - f. Jumlah Kelompok Pengolahan yang telah dibina
3. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja utama yaitu:
- a. Nilai evaluasi AKIP

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin, rawan pangan dan masyarakat gizi buruk
- b. Produsen dan konsumen bahan pangan
- c. Kelompok tani
- d. Pengrajin / pengolahan pangan lokal
- e. Kelompok wanita
- f. Kepala keluarga / ibu rumah tangga
- g. Kelompok LDPM
- h. Kelompok Lumbung Pangan
- i. Gapoktan
- j. Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perikanan

6.4 Pendanaan Indikatif

Sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Ketahanan Pangan berasal dari dana APBD dan Dana Dekonsentrasi Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PANGAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel VII. 18
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bidang Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari.		2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari	2400 kkal /kap/hari
			63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr	63 gr/kap/hr
2	Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah		12 ton	12 ton	45 ton	47 ton	50 ton	50 ton
3	Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)		38%	30%	23%	15%	7%	7%
			38%	30%	23%	15%	7%	7%
			76%	69%	61%	53%	46%	46%
4	Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan		6	8	11	14	16	16
5	Jumlah Nagari Mandiri Pangan		1	2	3	4	5	5
6	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.		67,5	69,5	71,5	73,5	75,5	75,5

7	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium.		75%	80%	85%	90%	95%	95%
8	Nilai evaluasi AKIP		55	60	65	70	75	75

Pada revisi renstra 2016-2021 terdapat beberapa perubahan dan target indikator kinerja dari sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya perubahan dan penyempurnaan aturan baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Perubahan-perubahan tersebut terdapat pada beberapa indikator dan target kinerja sebagai berikut :

1. Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein kap/hari.

Jumlah ketersediaan energi dan protein masyarakat di dalam RPJMD sebelumnya dimana target pada angka 6.500 Kkal/Kap/Hari dan 72 Gr/Kap/Hari merupakan angka yang sangat tinggi dan bukan merupakan indeks nasional dimana secara nasional ditetapkan angka tersebut hanya 2.400 Kkal/Kap/Hari dan 63 Gr/Kap/Hari.

2. Jumlah penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/KN.130/1/2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dimana ditetapkan bahwa Cadangan Pangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 160,8 Ton/Tahun sedangkan dalam target RPJMD sebelumnya ditetapkan 100 Ton sampai akhir tahun 2021. Target cadangan beras daerah sampai dengan tahun 2021 belum juga mencapai cadangan beras seperti yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri tersebut diatas, hal ini disebabkan karena alokasi anggaran yang sangat kecil.

3. Persentase kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan).

Indikator ini merupakan gabungan dari aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan untuk melihat tingkat kategori kerawanan pangan pada suatu kecamatan. Ini merupakan penggabungan dari indikator jumlah daerah rawan pangan, skor kerawanan pangan minimal pada RPJMD sebelumnya. Target kinerja yang cenderung menurun sampai pada akhir tahun 2021 mencapai 7% yang artinya hanya tinggal 1 Kecamatan yang rawan pangan dari 13 Kecamatan yang ada.

4. Jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan.

Indikator ini merupakan replikasi dari jumlah cadangan pangan masyarakat pada RPJMD sebelumnya yang mana target kinerja merupakan sarana lumbung pangan yang akan dipenuhi sampai akhir tahun 2021 sebanyak 16 unit.

5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan berdasarkan angka kecukupan gizi.

Terjadi perubahan target kinerja dari RPJMD sebelumnya dimana target akhir 91,2 diturunkan menjadi 75,5 karena hal ini disebabkan :

- a. Berdasarkan angka Susenas 3 (tiga) tahun terakhir capaian skor PPH Kabupaten Lima Puluh Kota masih jauh dari target 76,1 dimana di tahun 2016 skor PPH sebesar 68,2 dan tahun 2017 sebesar 72,5.
 - b. Untuk meningkatkan capaian skor PPH dibutuhkan sinergitas kegiatan di semua lini karena menyangkut pada perubahan perilaku masyarakat agar dapat mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam keluarga.
6. Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium.

Indikator ini merupakan indikator kinerja baru dimana aspek keamanan pangan merupakan suatu sub kewenangan dinas pangan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pengujian sampel pangan di lapangan dan di laboratorium akan memberikan informasi tentang pangan yang beredar di masyarakat dan juga dengan pengujian ini diharapkan merubah perilaku konsumsi pangan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam pengujian tersebut ditargetkan pada akhir tahun 2021 sampel pangan masyarakat yang dilakukan pengujian tersebut sebesar 95% dinyatakan aman.

TABEL VI.17
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA				
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	DIANS PANGAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAKBERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PROGRAM DAN KEGIATAN YANG ADA PADA SETIAP SKPD																			
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya kebutuhan administrasi kantor	80%	81%	229.075.800	82%	375.630.000	83%	375.326.100	84%	483.000.000	85%	635.500.000	86%	639.000.000	86%	2.737.531.700	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
1	Kegiatan Surat Menyurat	Nilai Evaluasi AKIP	515 buah	575 buah	2.400.000	575 buah	2.400.000	600 Buah	2.400.000	460 buah, 25 buku	3.500.000	650 Buah	3.500.000	700 buah	4.000.000	3.750 Buah	18.200.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi AKIP	1 Tahun	1 Tahun	19.500.000	1 Tahun	21.600.000	1 Tahun	24.330.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	35.000.000	6 Tahun	165.430.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Aparatur	Aparatur	117.626.000	Aparatur	225.040.000	Aparatur	133.290.000	1 tahun	150.000.000	Aparatur	250.000.000	Aparatur	250.000.000	Aparatur	1.125.956.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor																		Kab.50 kota	
5	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Nilai Evaluasi AKIP	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	9.000.000	1 Tahun	8.980.000	1 Tahun	22.000.000	1 Tahun	12.000.000	1 Tahun	15.000.000	6 Tahun	72.980.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nilai Evaluasi AKIP	1 Tahun	1 Tahun	14.049.600	1 Tahun	31.642.000	Aparatur	23.324.500	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	6 Tahun	159.016.100	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi AKIP	1 Tahun	1 Tahun	12.500.000	1 Tahun	13.748.000	1 Tahun	23.457.600	582 buah, 34250 Imbr, 70 buah	25.000.000	1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	30.000.000	6 Tahun	134.705.600	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
8	Penyediaan Jasa Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi AKIP	1 Tahun	1 Tahun	1.200.000	1 Tahun	1.200.000	1 Tahun	3.660.000	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	6 Tahun	31.060.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
9	Penyediaan Makanan dan Minum	Nilai Evaluasi AKIP	Aparatur	Aparatur	5.800.000	1 Tahun	7.000.000	Aparatur	12.980.000	985 porsi	17.500.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	6 Tahun	73.280.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	64.000.000	12 Bulan	142.904.000	12 Bulan	200.000.000	12 Bulan	250.000.000	12 Bulan	250.000.000	72 Bulan	956.904.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	90%	91%	102.680.000	92%	531.680.000	93%	203.581.700	94%	614.000.000	95%	325.000.000	96%	350.000.000	96%	2.126.941.700	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	1 Unit Mobil dan 4 unit kendaraan roda 2	397.000.000	-	-	1 Unit Mobil dan 4 unit kendaraan roda 2	370.000.000	-	-	-	-	2 Unit Kendaraan Dinas Roda 4, 8 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	767.000.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Nilai Evaluasi AKIP	1 Tahun	1 Tahun	43.980.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	82.000.000	8 unit meja, 8 unit kursi dan 1 infokus	94.000.000	AC 5 Unit, Komputer 5 Unit, 3 Unit Printer, Kursi 5 Unit, Laptop 2 Unit	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	569.980.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
3	Pemeliharaan rutin berkala/gedung Kantor	Nilai Evaluasi AKIP	1 Tahun	1 Tahun	19.500.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	23.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Tahun	207.500.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
4	Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas dan operasional	Nilai Evaluasi AKIP	1 Tahun	1 Tahun	39.200.000	1 Tahun	69.680.000	1 Tahun	98.581.700	1 tahun	100.000.000	9 Unit	125.000.000	13 Unit	150.000.000		582.461.700	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	80%	80%	12.500.000	80%	12.500.000	80%	44.724.300	80%	17.500.000	80%	17.500.000	80%	70.000.000	80%	47.500.000	Dinas Pangan		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Nilai Evaluasi AKIP	20 Orang	25 Orang	12.500.000	-	-	-	-	32 stel	17.500.000	-	-	-	-	60 Orang	30.000.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 Orang	17.500.000	-	-	-	-	17.500.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan Aparatur mengenai Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan	80%	80%	12.500.000	80%	12.500.000	80%	44.724.300	80%	90.000.000	80%	70.000.000	80%	70.000.000	80%	287.224.300	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	1 Tahun	12.500.000	1 kali, 1 Tahun	14.849.300	2 kali	30.000.000	2 kali	35.000.000	2 kali	35.000.000		127.349.300	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Nilai Evaluasi AKIP	-	-	-	-	-	1 Tahun	29.875.000	12 kali	60.000.000	12 Kali	35.000.000	12 Kali	35.000.000		159.875.000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
V	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan				678.781.500		734.285.200		3.672.146.700		3.102.673.100		3.180.000.000		3.130.000.000		14.428.431.500	Dinas Pangan		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN ANJAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
1	Penanganan daerah rawan pangan	Persentase Kecamatan Kategori Rawan Pangan berdasarkan Peta Komposit SKPG (Aspek Ketersediaan, Aspek Akses dan Aspek Pemanfaatan Pangan)	Kecamatan Rawan Pangan, 2x1 Tahun	1. Kabupaten, 12 Bulan (12 Laporan), 2. Kabupaten 1 Kali, 3. 1 Dokumen	29,455,000	1. Dokumen, 12 Bulan (12 Dokumen, 4 kali (Kabupaten), 1 kali	49,852,000	13 Kecamatan, 1 dokumen, 13 kecamatan, 124 paket	198,845,000	1. 1 dokumen 2. 50 anak, 2 bulan 3. 12 bulan 4. 1 kali 5. 1 kali	300,000,000	120 Jiwa, kecil dan 3. 2 kali	350,000,000	150 Jiwa, kecil dari 3. 2 kali	40,000,000	938,697,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
2	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein (Kaphan)	13 Kecamatan	1. 13 Kecamatan, 2. 25 buah Buku NBM 1 Kali, 3. 25 buah, 4. 12 Orang	28,412,000	-	-	-	0	-	0	-	-	0	28,412,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota		
3	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein (Kaphan)	30 buah buku NBM 1 Tahun 1 kali	-	-	25 Buah Buku NBM 1 Tahun 1 kali	13,000,000	30 buah buku NBM 1 Tahun 1 kali	15,917,000	-	-	-	-	-	28,917,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota		
4	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	13 Kecamatan, Kabupaten 1 kali, kabupaten 1 kali, 11 kelompok, 1 dokumen, 5 unit, Kabupaten 2 orang	-	-	min 20 rumah (tangga/Nagari), 13 Kecamatan, 1 suat Kabar, 13 Kecamatan, 13 Kelompok	79,178,000	13 Kecamatan, Kabupaten 1 kali, Kabupaten 1 kali, 11 Kelompok, 1 Dokumen, 5 unit	289,800,500	1. 5 kali 2. 5 kmppk baru dan 10 kp lama 3. 1 kali, kab 4. 15 kelompok 5. 1 dokumen	425,000,000	13 kecamatan, 20 Nagari, Kabupaten 1 kali, Nagari 1 kali	450,000,000	13 kecamatan, 20 Nagari, Kabupaten 1 kali, Nagari 1 kali	450,000,000	1,693,978,500	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
5	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein (Kaphan)	1. 23 komoditi, 2. 3 kali, 30 stakeholder, 3. 1 dokumen, 4. 2 unit balho	-	-	-	67,370,000	23 Komoditi, 3 kali, 30 stakeholder, 1 Dokumen, 2 unit balho	126,732,300	1. 13 kec. 2. 1 tahun 3. 1 kali 4. 1 tahun	180,000,000	13 Kecamatan, 3 kali, 13 Kecamatan	200,000,000	13 Kecamatan, 4 kali, 13 Kecamatan	220,000,000	794,102,300	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
6	Pemantauan akses dan harga pangan pokok	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein (Kaphan)	10 orang	1. 13 Kecamatan, 2. 3. 13 Orang, 4. Harian	62,496,500	-	-	-	0	-	0	-	-	-	62,496,500	Dinas Pangan	Kab.50 kota		
7	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	50 Orang	1. 2 Angkatan, 2. 26 Usaha Pangan Lokal, 3. Kabupaten, 1 Kali	56,800,000	50 Orang, 1 Kelompok 1 kali, 13 Kecamatan, 1 kali, kabupaten 1 kali	69,965,400	-	-	1. 1 kali 2. 2 kali 3. 3 kali 4. 6 rim	275,000,000	26 Kelompok,	-	-	401,765,400	Dinas Pangan	Kab.50 kota		
8	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	5,1 Ton (5.130 Kg), 1 kali	1. Kabupaten, 2. 11 Kelompok, 3. 1 Tahun	93,460,000	4 Ton (4000 Kg), 1 kali	60,000,000	5,1 Ton (5.130 Kg), 1 kali	93,745,000	60 ton	721,255,600	60 ton	800,000,000	60 ton	880,000,000	60 ton	2,648,460,600	Dinas Pangan	Kab.50 kota
9	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	11 Nagari	1. 11 Nagari, 2. 25 kelompok, 3. 17 Orang, 4. 2 Kali, 5. 11 Nagari	100,825,000	-	-	3 Nagari, 1 kali, 3 Nagari, 13 Kecamatan, 3 Nagari, 20 nagari	338,187,900	2 dok, 1 kali, 2 kali dan 1 paket (3 nagari)	347,000,000	1 Nagari, 14 Nagari, 1 Nagari, 2 kali	375,000,000	2 Nagari, 16 Nagari, 2 Nagari, 2 kali	400,000,000	1,561,012,900	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
10	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung	1 unit	-	-	17 Kelompok, 1 Kali Pertemuan, 1 kali evaluasi	34,000,000	1 unit	2,346,992,600	1. 4 ton gabah perlumbung, 2. 11 kali 3. 1 kali 4. 11 unit lumbung pangan masyarakat 5. 1 paket	393,967,500	1 unit lumbung, 4 ton gabah, 15 kelompok, 2 kali	450,000,000	1 unit, 16 kelompok, 2 kali	500,000,000	3,724,960,100	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
11	Pengembangan Model Distribusi pangan yang efisien	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein (Kaphan)	25 Gapoktan	13 Kecamatan	38,563,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,563,000	-	Kab.50 kota		

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi	
				TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021					
				Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				Target
12	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	13 Orang	1. Kabupaten, 1 kali, 2. 13 Kecamatan, 3. 2 SD perKecamatan n. 4. 5 SD, 5. 10 Sampel	40,000,000	Kabupaten 2 kali, 10 sampel, 500 bh, 50 rumah tangga, 13 pasar 2 kebun, Kabupaten 1 kali 10 SD, 3 paket	159,795,800	5 Kecamatan, 1 kali, 1 kali, 10 SD, 10 sampel, 3 paket, 1 paket, 1 paket	140,179,000	1. 13 kecamatan 2. 2 kali 3. 3 kali 4. 10 sampel hasil 5. 2 paket	300,000,000	13 pasar, 5 kali, 20 SD, 20 sampel, 5 paket, 5 kecamatan	330,000,000	13 pasar, 5 kali, 20 SD, 30 sampel, 5 paket, 5 kecamatan	370,000,000	1,299,974,800	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
13	Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	Kabupaten, 2 Angkatan, 100 Orang	1. Kabupaten, 1 Kali, 2. Propinsi, 1 Kali, 3. Stiker 1 Rim, Booklet 250 buah, poster 3 rim dan surat kabar 2 kali, Baliho dan radio spot, 4. 36 KWT Dasawisma Pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	112,010,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,010,000	-	Kab.50 kota	
14	Pemantauan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	kabupaten	1. Kabupaten, 2. Kabupaten 1 kali, 3. 13 Kecamatan, 4. 1 Dokumen	29,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,600,000	-	Kab.50 kota	
15	Kebijakan Koordinasi Ketahanan Pangan	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein (Kap/ha)	1 kali	1. 1 kali, 2. 1 Tahun, 3. 1 kali, 4. 1 kali	37,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,160,000	-	Kab.50 kota	
16	Gerakan Kemandirian Pangan	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	20 Umbul-umbul	1 kali, 10 unit	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000	-	Kab.50 kota	
17	Pengembangan cadangan pangan masyarakat	Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung	-	-	-	1 unit	155,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
VI	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																		
1	Pelatihan Petaku Agribisnis	Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	2 topik, 2 ki, 100 peserta, 1 ki, 1 ki, 1 dokumen	46,124,000	1 Topik, 1 kali, 1 kali, 100 Peserta, 1 kali, 50 Peserta, 13 Kecamatan, 13 Kecamatan	101,959,900	4 kali, 1 kali	70,450,000	2 kali, 1 kali, 2 kali	115,000,000	2 kali, 1 kali, 2 kali	120,000,000	2 kali, 1 kali, 2 kali	453,533,900	Dinas Pangan	Kab.50 kota
2	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	-	-	-	-	-	-	19,787,500	3 kali	90,000,000	130 Kelompok	110,000,000	136 Kelompok	150,000,000	136 Kelompok	369,787,500	Dinas Pangan	Kab.50 kota

TABEL VI.17
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH Kota Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab			
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi perkantoran yang cukup	1 02 03 1 02 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya kebutuhan administrasi kantor		229,075,600	375,630,000						375,326,100		483,000,000		635,500,000			639,000,000		2,737,531,700	
		1 02 03 1 02 03 01 01	01	Kegiatan Surat Menyurat	Tersedianya benda pos dan materai	515 buah	575 buah	2,400,000	575 buah	2,400,000	600 Buah	2,400,000	650 buah	3,500,000	650 Buah	3,500,000	700 buah	4,000,000	3,750 Buah	18,200,000	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 01 01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	19,500,000	1 Tahun	21,600,000	1 Tahun	24,330,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	35,000,000	6 Tahun	165,430,000	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 01 01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan	Aparatur	Aparatur	117,626,000	Aparatur	225,040,000	Aparatur	133,290,000	Aparatur	150,000,000	Aparatur	250,000,000	Aparatur	250,000,000	Aparatur	1,125,956,000	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 01 01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor																			
		1 02 03 1 02 03 01 01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	6,000,000	1 Tahun	9,000,000	1 Tahun	8,980,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	12,000,000	1 Tahun	15,000,000	6 Tahun	72,980,000	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 01 01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK Dinas Pangan	1 Tahun	1 Tahun	14,049,600	1 Tahun	31,642,000	Aparatur	23,324,500	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	6 Tahun	159,016,100	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 01 01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	12,500,000	1 Tahun	13,748,000	1 Tahun	23,457,600	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	6 Tahun	134,705,600	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 01 01	12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik serta pemeliharaan jaringan listrik	1 Tahun	1 Tahun	1,200,000	1 Tahun	1,200,000	1 Tahun	3,660,000	1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	10,000,000	6 Tahun	31,060,000	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 01 01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Aparatur	Aparatur	5,800,000	1 Tahun	7,000,000	Aparatur	12,980,000	1 Tahun	17,500,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	15,000,000	6 Tahun	73,280,000	Dinas Pangan		
		1 02 03 1 02 03 01 01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	64,000,000	12 Bulan	142,904,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	72 Bulan	956,904,000	Dinas Pangan		
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang cukup	1 02 1 02 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	90%	102,680,000	531,680,000				203,581,700		589,000,000		305,000,000		335,000,000		2,066,941,700	Dinas Pangan			
		1 02 1 02 03 01 02		Pengadaan kendaraan dinas operasional					1 Unit Mobil dan 4 unit kendaraan roda 2	397,000,000			1 Unit Mobil dan 4 unit kendaraan roda 2	370,000,000					2 Unit Kendaraan Dinas Roda 4, 8 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	767,000,000	Dinas Pangan		
		1 02 1 02 03 01 02		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhiya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	43,980,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	82,000,000	20 Unit	94,000,000	AC 5 Unit, Komputer 5 Unit, 3 Unit Printer, Kursi 5 Unit, Laptop 2 Unit	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	569,980,000	Dinas Pangan		
		1 02 1 02 03 01 02		Pemeliharaan rutin berkala gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	19,500,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	23,000,000	1 Paket	25,000,000	1 Paket	30,000,000	1 Paket	35,000,000	1 Tahun	147,500,000	Dinas Pangan		
		1 02 1 02 03 01 02		Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas dan operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor	1 Tahun	1 Tahun	39,200,000	1 Tahun	69,680,000	1 Tahun	98,581,700	9 Unit	100,000,000	9 Unit	125,000,000	13 Unit	150,000,000		582,461,700	Dinas Pangan		
Meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	1 02 1 02 03 01	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		12,500,000							17,500,000						47,500,000	Dinas Pangan			
		1 02 1 02 03 01		Pengadaan Pakiaian Dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang Disiplin	20 Orang	25 Orang	12,500,000	-	-	-	-	35 Orang	17,500,000	-	-	-	-	60 Orang	30,000,000	Dinas Pangan		
		1 02 1 02 03 01		Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		-	-	-	-	-	-	-	-	35 Orang	17,500,000	-	-	-		17,500,000	Dinas Pangan		
Meningkatkan kpasilas sumber daya aparatur	Meningkatnya kinerja sumber daya aparatur yang memadal	1 02 1 02 03 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan Aparatur mengenai Keadulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan			12,500,000				44,724,300		90,000,000		70,000,000		70,000,000		287,224,300				
		1 02 1 02 03 01 05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Keadulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	1 Tahun	12,500,000	1 kali, 1 Tahun	14,849,300	2 kali	30,000,000	2 kali	35,000,000	2 kali	35,000,000		127,349,300	Dinas Pangan		
		1 02 1 02 03 01 05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pelatihan Bimtek bagi Aparatur	-	-	-	-	-	1 Tahun	29,875,000	12 kali	60,000,000	12 Kali	35,000,000	12 Kali	35,000,000		159,875,000	Dinas Pangan		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab			
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan	1 02 03 1 02 03 15 01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan					678.781,500			734.285,200			3.672.146,700		3.102.673,100		3.180.000,000		3.130.000,000		14.428.431,500	Dinas Pangan
		1 02 03 1 02 03 15 01	Penanganan daerah rawan pangan	1. Tertangannya secara dini kejadian rawan pangan disuatu wilayah, 2. Terbentuknya tim SKPG / PDRP Kabupaten, 3. Terlaksananya temu ilmiah kajian kewaspadaan pangan, 4. Terlaksananya pertemuan/apat tim SKPG/PDRP setiap Trwulan	Kecamatan Rawan Pangan, 2x1 Tahun		29.455,000	1 Dokumen, 12 Bulan 12 Dokumen, 4 Kabupaten 1 Kali, 3. 1 Dokumen	49.852,000	13 Kecamatan, 1 dokumen, 13 kecamatan, 124 paket	198.845,000	100 Jiwa, Kecil dari 3, 100 Jiwa	300.000,000	120 Jiwa, kecil dari 3, 2 kali	350.000,000	150 Jiwa, kecil dari 3, 2 kali	40.000,000				938.697,000	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 04	Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	1. Tertangannya secara dini kejadian di suatu wilayah, 2. Tersedianya Buku Potensi Produksi Pangan Lokasi DMP, 3. Tersedianya buku NBM Kabupaten, 4. Terbentuknya Tim NBM Kabupaten	13 Kecamatan	1.13 Kecamatan, 2. 25 buah Buku NBM 1 Kali, 3. 25 buah, 4. 12 Orang	28.412,000					0									0	28.412,000	Dinas Pangan
		1 02 03 1 02 03 15 05	Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan	Tersedianya data informasi tentang ketersediaan distribusi dan pasokan pangan melalui Neraca bahan Makanan	30 buah buku NBM 1 Tahun 1 kali			25 Buah Buku NBM 1 Tahun 1 kali	13.000,000	30 buah buku NBM 1 Tahun 1 kali	15.917,000											28.917,000	Dinas Pangan
		1 02 03 1 02 03 15 09	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Terlaksananya sosialisasi optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kecamatan, Terlaksananya lomba optimalisasi pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten, Tersalurnya bantuan bibit/benih tanaman sayur/buah bagi kelompok masyarakat, Tersusunnya informasi tentang situasi pola konsumsi pangan masyarakat melalui data sekunder dalam bentuk buku, Terlaksananya pembuatan desain balho, Workshop / magang optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Sosialisasi Nagari Mantap	13 Kecamatan, Kabupaten 1 kali, 11 kelompok, 1 dokumen, 5 unit, Kabupaten 2 orang	min 20 rumah tangga/Nagari, 13 Kecamatan, 1 suari Kabar, 13 Kecamatan, 13 Kelompok, 1 Dokumen, 5 unit	79.178,000	13 Kecamatan, Kabupaten 1 kali, 11 Kecamatan, 1 kali, 11 Kelompok, 1 Dokumen, 5 unit	289.800,500	13 kecamatan, -, 15 Nagari, Kabupaten 2 kecamatan, 1 kali, Nagari 1 kali	425.000,000	13 kecamatan, -, 20 Nagari, Kabupaten 1 kali, Nagari 1 kali	450.000,000	13 kecamatan, -, 20 Nagari, Kabupaten 1 kali, Nagari 1 kali	450.000,000						1.693.978,500	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 10	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	1. Terlaksananya pemantauan distribusi, akses dan harga, 2. Terlaksananya pertemuan panel harga dalam rangka pengendalian inflasi daerah, 3. Terlaksananya pengumpulan data jaringan distribusi pangan, 4. Terakomodinya komoditi pangan lokal melalui pameran, 5. Tersedianya balho	1. 23 komoditi, 2. 3 kali, 30 stakeholder, 3. 1 dokumen, 4. 2 unit balho		67.370,000	23 Komoditi, 3 kali, 30 stakeholder, 1 Dokumen, 2 unit balho	126.732,300	13 Kecamatan, 2 kali, 13 Kecamatan	180.000,000	13 Kecamatan, 3 kali, 13 Kecamatan	200.000,000	13 Kecamatan, 4 kali, 13 Kecamatan	220.000,000						794,102,300	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 11	Pemantauan akses dan harga pangan pokok	Terbentuknya Tim Pemantauan stabilitas harga pangan	10 orang	1. 13 Kecamatan, 2-, 3. 13 Orang, 4. Harian	62.496,500					0		0							0	62.496,500	Dinas Pangan
		1 02 03 1 02 03 15 12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	1. Terlaksananya pemantauan dan pembinaan terhadap usaha pengolahan pangan lokal, 2. Terlaksananya Pameran Pangan Lokal dalam rangka Pekan Budaya Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	50 Orang	1. 2 Angkatan, 2. 26 Usaha Pangan Lokal, 3. Kabupaten, 1 Kali	56.800,000	50 Orang, 1 Kelompok 1 kali, 13 Kecamatan, 1 kali, kabupaten 1 kali	69.965,400			26 kelompok, 15 SD, 1 Paket	275.000,000	26 Kelompok,								401,765,400	Dinas Pangan
		1 02 03 1 02 03 15 13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah	5,1 Ton (5.130 Kg), 1 kali	1. Kabupaten, 2. 11 Kelompok, 3. 1 Tahun	93.460,000	4 Ton (4000 Kg), 1 kali	60.000,000	5,1 Ton (5.130 Kg), 1 kali	93.745,000	60 ton	721.255,600	60 ton	800.000,000	60 ton	880.000,000	60 ton			2.648.460,600	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 14	Pengembangan desa mandiri pangan	1. Terlaksananya sosialisasi program aksi Desa Mandiri Pangan, 2. Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembinaan kelompok DMP Inti, DMP Replikasi dan LUEP-KP, 3. Tersedianya tenaga Pendamping DMP Inti dan DMP Replikasi, 4. Terlaksananya pertemuan evaluasi kelompok DMP, LKD dan LUEP-KP	11 Nagari	1. 11 Nagari, 2. 25 kelompok, 3. 17 Orang, 4. 2 Kali, 5. 11 Nagari	100.825,000			3 Nagari, 1 kali, 3 Nagari, 13 Kecamatan, 3 Nagari, 20 nagari	338.187,900	2 Nagari, 2 Nagari, 1 kali, 2 Nagari, 14 Nagari	347.000,000	1 Nagari, 14 Nagari, 1 Nagari, 2 kali	375.000,000	2 Nagari, 16 Nagari, 2 Nagari, 2 kali	400.000,000				1.561.012,900	Dinas Pangan	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1 02 03 1 02 03 15 18	Pengembangan lumbung pangan desa	1. Tersedianya bangunan fisik dan lantai jemur Lumbung Pangan, 2. Terlaksananya bimbingan teknis pengelola lumbung pangan, 3. Terlaksananya monitoring dan pembinaan kelompok lumbung pangan dan kelompok tani, 4. Terlaksananya sosialisasi, pertemuan dan evaluasi, 5. Terlaksananya studi koperatif pengelola Lumbung Pangan Negeri	1 unit	-	-	17 Kelompok, 1 Kali Pertemuan, 1 kali evaluasi	34,000,000	1 unit	2,346,992,600	1. 4 ton gabah perlumbung, 2. 11 kali 3. 1 kali 4. 11 unit lumbung pangan masyarakat 5. 1 paket	393,967,500	1 unit lumbung, 4 ton gabah, 15 kelompok, 2 kali	450,000,000	1 unit, 4 ton gabah, 16 kelompok, 2 kali	500,000,000	3,724,960,100	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 19	Pengembangan Model Distribusi pangan yang efisien	Meningkatnya nilai tambah petani dalam pengelolaan hasil pangan	25 Gapoktan	13 Kecamatan	38,563,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,563,000		
		1 02 03 1 02 03 15 22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	1. Terbentuknya Tim Terpadu Pemantauan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan tahun 2015 tingkat Kabupaten, 2. Terlaksananya Pemantauan/Pengawasan mutu dan keamanan pangan baik segar maupun olahan secara terpadu, 3. Terlaksananya sosialisasi dan edukasi bagi murid, guru dan penjual jajanan di sekolah tentang mutu dan keamanan pangan jajanan murid SD, 4. Terlaksananya pengambilan dan pemeriksaan sampel pangan segar dan olahan serta uji laboratorium sebanyak 12 sampel, Tersedianya perlengkapan keperluan uji sederhana sampel pangan segar, Terlaksananya sosialisasi sertifikasi prima 3	13 Orang	1. Kabupaten, 1 kali, 2. 13 Kecamatan, 3. 2 SD perKecamatan, 4. 5 SD, 5. 10 Sampel	40,000,000	Kabupaten 2 kali, 10 sampel, 500 bh, 50 rumah tangga, 13 pasar, 2 kebun, Kabupaten 1 kali 10 SD, 3 paket	159,795,800	5 Kecamatan, 1 kali, 10 SD, 10 sampel, 3 paket, 1 paket, 1 paket	140,179,000	5 Kecamatan, 2 kali, 1 kali, 10 SD, 20 Sampel, 1 Paket	300,000,000	13 pasar, 5 kali, 20 SD, 20 sampel, 5 paket, 5 kecamatan	330,000,000	13 pasar, 5 kali, 20 SD, 30 sampel, 5 paket, 5 kecamatan	370,000,000	1,299,974,800	Dinas Pangan	
		1 02 03 1 02 03 15 33	Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Masyarakat	1. Terlaksananya diseminasi/sosialisasi konsumsi pangan B2SA bagi guru dan siswa SMP, 2. Terikutnya Lomba Cipta Menu B2SA tingkat Provinsi Sumatera Barat, 3. Terikutnya pameran Hari Pangan Sedunia tingkat Provinsi Sumatera Barat, 4. Terselenggaranya Promosi Diversifikasi pangan melalui media leaflet, 5. Terlaksananya pembinaan pola konsumsi pangan masyarakat, 6. Terlaksananya sosialisasi pangan B2SA bagi Toma, PKK dan Aparat Kecamatan	Kabupaten, 2 Angkatan, 100 Orang	1. Kabupaten, 1 Kali, 2. Propinsi, 1 Kali, 3. Stiker 1 Rim, Booklet 250 buah, poster 3 rim dan surat kabar 2 kali, Balho dan radio spot, 4. 36 KWT ID/awisma Pelaksanaan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	112,010,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112,010,000		
		1 02 03 1 02 03 15 41	Pemantapan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	1. Terbentuknya Tim Pengumpul data dan Tim Penyusun Buku Pola Konsumsi Pangan Masyarakat tingkat Kabupaten, 2. Terlaksananya sosialisasi/Rapat persiapan pengumpulan data/survey pola konsumsi, 3. Terlaksananya pengumpulan data pola konsumsi pangan masyarakat, 4. Tersedianya data/informasi (buku) terkait pola konsumsi pangan masyarakat	kabupaten	1. Kabupaten, 2. Kabupaten 1 kali, 3. 13 Kecamatan, 4. 1 Dokumen	29,600,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,600,000		
		1 02 03 1 02 03 15 42	Kebijakan Koordinasi Ketahanan Pangan	1. Terlaksananya rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, Provinsi dan Pusat, 2. Terbentuknya kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan, 3. Terlaksananya pengumpulan data Ketahanan Pangan, 4. Terbentuknya plang Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten	1 kali	1. 1 kali, 2. 1 Tahun, 3. 1 kali, 4. 1 kali	37,160,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,160,000		
		1 02 03 1 02 03 15 43	Gerakan Kemandirian Pangan	1. Terlaksananya sarana promosi berupa umbul-umbul terkait gerakan kemandirian pangan, 2. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di Nagari, 3. Terlaksananya perencanaan Gerakan Kemandirian Pangan	20 Umbul-umbul	1 kali, 10 unit	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000,000		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab				
						TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	4				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1 02 03 1 02 03 15 45	Pengembangan cadangan pangan masyarakat	Tersedianya bangunan fisik dan lantai jemur lumbung pangan	-	-	-	-	1 unit	155,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	155,000,000	Dinas Pangan
Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Meningkatnya pendapatan dan penghasilan petani	1 02 03 1 02 03 01 16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																					
		1 02 03 1 02 03 01 16 01	Pelatihan Pelaku Agribisnis	1. Terlaksananya pelatihan Teknis SDM Pangan, 2. Terlaksananya seminar pangan daerah, 3. Terlaksananya pelatihan pengolahan pangan lokal, 4. Terlaksananya lomba cipta menu B2SA Tk. Kabupaten dan Provinsi, 5. Terlaksananya lomba pengolahan pangan lokal Tk. Kabupaten dan Provinsi, 6. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi kegiatan pelatihan petani	-	-	-	-	2 topik, 2 kl, 100 peserta, 1 kl, 1 kl, 1 dokumen	46,124,000	1 Topik, 1 kali, 1 kali, 100 Peserta, 1 kali, 50 Peserta, 13 Kecamatan, 13 Kecamatan	101,959,900	2 kali, 1 kali, 2 kali	70,450,000	2 kali, 1 kali, 2 kali	115,000,000	2 kali, 1 kali, 2 kali	120,000,000	2 kali, 1 kali, 2 kali	453,533,900	Dinas Pangan			
		1 02 03 1 02 03 01 16 03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Terlaksananya monitoring dan pembinaan kelompok pengolahan pangan lokal di kabupaten lima puluh kota, Terlaksananya dialog kerja Pemerintah Daerah dengan elemen masyarakat pada kelompok/lembaga penyelenggara urusan pangan daerah	-	-	-	-	-	19,787,500	126 Kelompok	90,000,000	130 Kelompok	110,000,000	136 Kelompok	150,000,000	136 Kelompok	369,787,500	Dinas Pangan					

Lokasi

23

Dinas Pangan

Lokasi

23

Dinas Pangan

Lokasi

23

Dinas Pangan

--

--

--

--

TABEL VI.17
 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS PANGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

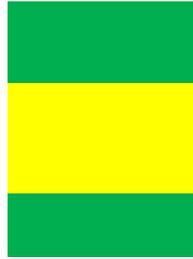
TUJUAN	SASARAN	KODE	NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi		
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Tahun 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	2	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Kebutuhan Administrasi perkantoran yang cukup	1.02.03.1.02.03.01.01	01	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertayangnya kebutuhan administrasi kantor	80%	81%	229.075,600	82%	375.630,000	83%	375.326,100	84%	483,000,000	85%	635,500,000	86%	638,600,000	86%	2,737,531,700	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	01	1	Kegiatan Surat Menyurat	Tersedianya benda pos dan materi	515 buah	575 buah	2,400,000	575 buah	2,400,000	600 Buah	2,400,000	460 buah, 25 buku	3,500,000	650 Buah	3,500,000	700 buah	4,000,000	3,750 Buah	18,200,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	02	2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa kebutuhan komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	19,500,000	1 Tahun	21,600,000	1 Tahun	24,330,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	35,000,000	6 Tahun	165,430,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	07	3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya kebutuhan jasa administrasi keuangan	Aparatur	Aparatur	117,626,000	Aparatur	225,040,000	Aparatur	133,290,000	1 tahun	150,000,000	Aparatur	250,000,000	Aparatur	250,000,000	Aparatur	1,125,956,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	08	4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor																		
		1.02.03.1.02.03.01.01	09	5	Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	Terlaksananya kegiatan jasa perbaikan peralatan kantor	1 Tahun	1 Tahun	6,000,000	1 Tahun	9,000,000	1 Tahun	8,980,000	1 Tahun	22,000,000	1 Tahun	12,000,000	1 Tahun	15,000,000	6 Tahun	72,980,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	10	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan ATK Dinas Pangan	1 Tahun	1 Tahun	14,049,600	1 Tahun	31,642,000	Aparatur	23,324,500	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	6 Tahun	159,016,100	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	11	7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Cetak dan Penggandaan Dokumen	1 Tahun	1 Tahun	12,500,000	1 Tahun	13,748,000	1 Tahun	23,457,600	582 buah, 34250 Imbr, 70 buah	25,000,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	30,000,000	6 Tahun	134,705,600	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	12	8	Penyediaan Jasa Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik serta pemeliharaan jaringan listrik	1 Tahun	1 Tahun	1,200,000	1 Tahun	1,200,000	1 Tahun	3,660,000	1 Tahun	5,000,000	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	10,000,000	6 Tahun	31,060,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	17	9	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makanan dan minuman	Aparatur	Aparatur	5,800,000	1 Tahun	7,000,000	Aparatur	12,980,000	985 porsi	17,500,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	15,000,000	6 Tahun	73,280,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.01.01	18	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya dana untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	64,000,000	12 Bulan	142,904,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	250,000,000	12 Bulan	250,000,000	72 Bulan	956,904,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang cukup	1.02.1.02.03.01.02	02	II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Terpeliharanya pemeliharaan gedung kantor	90%	91%	102,680,000	92%	531,680,000	93%	293,581,700	94%	614,000,000	95%	325,000,000	96%	350,000,000	96%	2,126,941,700	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.1.02.03.01.02	01	1	Pengadaan kendaraan dinas (operasional)					1 Unit Mobil dan 4 unit kendaraan roda 2	397,000,000			1 Unit Mobil dan 4 unit kendaraan roda 2	370,000,000					2 Unit Kendaraan Dinas Roda 4, 8 Unit Kendaraan Dinas Roda 2	767,000,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.1.02.03.01.02	02	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhihnya pemeliharaan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	43,980,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	82,000,000	8 unit meja, 8 unit kursi dan 1 infokus	94,000,000	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	569,980,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota
		1.02.1.02.03.01.02	03	3	Pemeliharaan rutin berkala/gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	19,500,000	1 Tahun	15,000,000	1 Tahun	23,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Paket	50,000,000	1 Tahun	207,500,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.1.02.03.01.02	04	4	Pemeliharaan rutin berkala/kendaraan dinas dan operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional kantor	1 Tahun	1 Tahun	39,200,000	1 Tahun	69,680,000	1 Tahun	98,581,700	1 tahun	100,000,000	9 Unit	125,000,000	13 Unit	150,000,000	1 Tahun	582,461,700	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
Meningkatkan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin dan kinerja aparatur	1.02.1.02.03.01	01	III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	80%	80%	12,500,000	80%		80%		80%	17,500,000	80%		80%		80%	47,500,000	Dinas Pangan		
		1.02.1.02.03.01	01	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Aparatur yang Disiplin	20 Orang	25 Orang	12,500,000	-	-	-	-	32 stel	17,500,000	-	-	-	-	60 Orang	30,000,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.1.02.03.01	02	2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 Orang	17,500,000	-	-	-	17,500,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	

TUJUAN	SASARAN	KODE	NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi				
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020				TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA	
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)
1	2	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur yang memadai	1.02.1.02.03.01.05	1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pengetahuan Aparatur mengenai Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan	80%	80%	80%	12.500,000	80%	44.724,300	80%	90,000,000	80%	70,000,000	80%	70,000,000	80%	287,224,300	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.1.02.03.01.05.02	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi tentang Peraturan Perundang-undangan Kedaulatan, Kemandirian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	1 Tahun	12,500,000	1 kali, 1 Tahun	14,849,300	2 kali	30,000,000	2 kali	35,000,000	2 kali	35,000,000	127,349,300	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.1.02.03.01.05.03	2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Pelatihan Bimtek bagi Aparatur	-	-	-	1 Tahun	-	29,875,000	12 kali	60,000,000	12 Kali	35,000,000	12 Kali	35,000,000	159,875,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota		
Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan	1.02.03.1.02.03.15	V	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan			320,540,000	520,161,200	3,554,269,800	3,132,223,100	3,175,000,000	3,131,000,000	13,763,739,100	Dinas Pangan								
		1.02.03.1.02.03.15.01	1	Penanganan daerah rawan pangan	Persentase Kecamatan Kategori Rawan Pangan berdasarkan Peta Komposit SKPG (Aspek Ketersediaan, Aspek Akses dan Aspek Pemanfaatan Pangan)	Kecamatan Rawan Pangan, 2x1 Tahun	1. Kabupaten, 12 Bulan (12 Laporan), 2. Kabupaten 1 Kali, 3. 1 Dokumen	29,455,000	1 Dokumen, 12 Bulan 12 Dokumen, 4 kali (Kabupaten), 1 kali	49,852,000	13 Kecamatan, 1 dokumen, 13 kecamatan, 124 paket	198,845,000	1. 1 dokumen 2. 50 anak, 2 bulan 3. 1 kali 4. 1 kali 5. 1 kali	300,000,000	120 Jiwa, kecil dari 3, 2 kali	350,000,000	150 Jiwa, kecil dari 3, 2 kali	40,000,000	938,697,000	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.15.08	2	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	13 Kecamatan, Kabupaten 1 kali, 11 kelompok, 1 dokumen, 5 unit, Kabupaten 2 orang	-	-	min 20 rumah tangga/Nagari, 13 Kecamatan, 1 suat Kabar, 13 Kecamatan, 13 Kelompok, 1 Dokumen, 5 unit	79,178,000	13 Kecamatan, Kabupaten 1 kali, Kabupaten 1 kali, 11 Kelompok, 1 Dokumen, 5 unit	289,800,500	1. 5 kali 2. 5 kelompok baru dan 10 klp lama 3. 1 kali, kab 4. 15 kelompok 5. 1 dokumen	425,000,000	13 kecamatan, -, 20 Nagari, Kabupaten 1 kali, Nagari 1 kali	450,000,000	13 kecamatan, -, 20 Nagari, Kabupaten 1 kali, Nagari 1 kali	450,000,000	1,693,978,500	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.15.10	3	Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Jumlah Ketersediaan Energi dan Protein (Kaphar)	1. 23 komoditi, 2. 3 kali, 30 stakeholder, 3. 1 dokumen, 4. 2 unit balho	-	-	67,370,000	23 Komoditi, 3 kali, 30 stakeholder, 1 Dokumen, 2 unit balho	126,732,300	1. 13 kec, 2. 1 tahun 3. 1 kali 4. 1 tahun	180,000,000	13 Kecamatan, 3 kali, 13 Kecamatan	200,000,000	13 Kecamatan, 4 kali, 13 Kecamatan	220,000,000	794,102,300	Dinas Pangan	Kab.50 kota		
		1.02.03.1.02.03.15.12	4	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Skor PPH Konsumsi Pangan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi	50 Orang	1. 2 Angkatan, 2. 26 Usaha Pangan Lokal, 3. Kabupaten, 1 Kali, kabupaten 1 kali	56,800,000	50 Orang, 1 Kelompok 1 kali, 13 Kecamatan, 1 kali, kabupaten 1 kali	69,965,400	-	-	1. 1 kali 2. 2 kali 3. 3 kali 4. 6 rim	275,000,000	26 Kelompok,	-	-	401,765,400	Dinas Pangan	Kab.50 kota		
		1.02.03.1.02.03.15.13	5	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	5.1 Ton (5.130 Kg), 1 kali	1. Kabupaten, 2. 11 Kelompok, 3. 1 Tahun	93,460,000	4 Ton (4000 Kg), 1 kali	60,000,000	5.1 Ton (5.130 Kg), 1 kali	93,745,000	60 ton	721,255,600	60 ton	800,000,000	60 ton	880,000,000	60 ton	2,648,460,600	Dinas Pangan	Kab.50 kota
		1.02.03.1.02.03.15.14	6	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	11 Nagari	1. 11 Nagari, 2. 25 kelompok, 3. 17 Orang, 4. 2 Kali, 5. 11 Nagari	100,825,000	-	-	3 Nagari, 1 kali, 3 Nagari, 13 Kecamatan, 3 Nagari, 20 nagari	338,187,900	2 dok, 1 kali, 2 kali dan 1 paket (3 nagari)	347,000,000	1 Nagari, 14 Nagari, 1 Nagari, 2 kali	375,000,000	2 Nagari, 16 Nagari, 2 Nagari, 2 kali	400,000,000	1,581,012,900	Dinas Pangan	Kab.50 kota	
		1.02.03.1.02.03.15.18	7	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung	1 unit	-	-	17 Kelompok, 1 Kali Pertemuan, 1 kali evaluasi	34,000,000	1 unit	2,346,992,600	1. 4 ton gabah perlumbung, 2 kali 3. 1 kali 4. 11 unit lumbung pangan masyarakat 5. 1 paket	393,967,500	1 unit lumbung, 4 ton gabah, 15 kelompok, 2 kali	450,000,000	1 unit, 16 kelompok, 2 kali	500,000,000	3,724,960,100	Dinas Pangan	Kab.50 kota	

TUJUAN	SASARAN	KODE	NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (TA 2015)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi			
							TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		Tahun 2021		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)					
1	2	4				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan	Meningkatnya pendapatan dan penghasilan petani	1.02.03.1.02.03.01.15.22	8	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Persentase sampel pangan segar yang dinyatakan aman berdasarkan uji laboratorium dan uji lapangan	13 Orang	1. Kabupaten, 1 kali, 2. 13 Kecamatan, 3. 2 SD perKecamatan, 4. 5 SD, 5. 10 Sampel	40,000,000	Kabupaten 2 kali, 10 sampel, 500 bh, 50 rumah tangga, 13 pasar 2 kebun, Kabupaten 1 kali 10 SD, 3 paket	159,795,800	5 Kecamatan, 1 kali, 1 kali, 10 SD, 10 sampel, 3 paket, 1 paket	140,179,000	1. 13 kecamatan 2. 2 kali 3. 3 kali 4. 10 sampel hasil 5. 2 paket	300,000,000	13 pasar, 5 kali, 20 SD, 20 sampel, 5 paket, 5 kecamatan	330,000,000	13 pasar, 5 kali, 20 SD, 30 sampel, 5 paket, 5 kecamatan	370,000,000	1,299,974,800	Dinas Pangan	Kab 50 kota				
			9	Penyusunan Database potensi produksi pangan	Jumlah Nagari Mandiri Pangan								1 Dokumen 1 Tahun	100,000,000	1 Dokumen 1 Tahun	110,000,000	1 Dokumen 1 Tahun	121,000,000	3 Dokumen	331,000,000	Dinas Pangan	Kab 50 kota			
		1.02.03.1.02.03.01.16	VI	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																					
		1.02.03.1.02.03.01.16.03	1	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah kelompok masyarakat pelaksana pembangunan ketahanan pangan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	-	-	-	-	-	-	19,787,500	3 kali	90,000,000	130 Kelompok	110,000,000	136 Kelompok	150,000,000	136 Kelompok	369,787,500	Dinas Pangan	Kab 50 kota			

4805500000





BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan dari tahun (2016 - 2021).

Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini menggambarkan arah, kebijakan dan strategi dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan dengan mengacu pada :

- a. Hasil-hasil yang dicapai pada periode 2011 - 2015;
- b. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi, dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021.

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.